

SKRIPSI
EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI PELAYANAN KEGIATAN NASIONAL DI
KOTA MATARAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Pada Program Studi
Perencanaan Wilayah Dan Kota Jenjang Strata I
Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI

EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI PELAYANAN KEGIATAN NASIONAL DI KOTA
MATARAM

Disusun Oleh:

HIDAYATUSHOLIH

416130070

Mataram, 20 Agustus 2020

Pembimbing I,

Baiq Harly Widavanti, ST., MM
NIDN.0802078401

Pembimbing II,

Sri Apriani Puji Lestari, ST., MT
NIDN.0816048801

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,



Dr. Eng. M. Islam Rusyda, ST., MT
NIDN. 0824017501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
SKRIPSI
EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI PELAYANAN KEGIATAN NASIONAL DI KOTA
MATARAM

Disusun Oleh :

NAMA : Hidayatusholiha

NIM : 416130070

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari : Kamis, 13 Agustus 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Penguji I : Baiq Harly Widayanti, ST., MM 
2. Penguji II : Sri Apriani Puji Lestari, ST., MT 
3. Penguji III : Febrita Susanti, ST., M.Eng 

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK


Dekan,
Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT
NIDN. 0824017501

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda- tangan dibawah ini:

NAMA : HIDAYATUSHOLIHA

NIM : 416130070

JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Di
Kota Mataram

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar ijazah pada Universitas Muhammadiyah Mataram atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, 20/08/2020

Yang membuat pernyataan,



Hidayatusholiha

416130070



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upi.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatusholih
NIM : 416130070
Tempat/Tgl Lahir : Mataram 29/04/1996
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 0812404040@gmail.com
Judul Penelitian : -

Evaluasi Ketersediaan Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Di Kota Mataram

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 25-08-2020

Penulis

Hidayatusholih
NIM. 416130070

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S. Sos, M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayaturohman
NIM : 416130070
Tempat/Tgl Lahir : Mataram 29/04/1996
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : hayakmahano@gmail.com
Jenis Penelitian : ☐ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kegiatan Harian di Kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 25-08-2020



Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

.....
**Di Balik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Yang Terpenting Usaha, Berdoa, Dan
Sabar, Semua Masalah Pasti terselesaikan.**
.....

Jangan Ragu Untuk Berbuat Baik Kepada Siapapun Dan Membantu Sesama Selagi Bisa.
.....



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah mendukung dan menyemangati saya, serta orang yang selalu mendokan saya. Maka dari itu saya mempersembahkan skripsi dan rasa terima kasih untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abdullah, SH dan Mamak Mujnah tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan materi serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Saudara Kandung saya, Uswatun Hasanah, Juhriyati, Ikhwatunnas, dan Ningsih, yang memberikan doa, dukungan dan materi untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
3. Dosen pembimbing I ibu Baiq Harly Ibu Baiq Harly Widayanti, ST., MM, yang dengan tulus dan tiada henti membimbing, menyemangati dan mengarahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Kepada Putri sebagai teman kuliah, teman main, teman jalan-jalan, teman kulineran, teman nonton, teman kerjain tugas dan teman yang mau membantu merapikan skripsi, sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Kepada Gofir dan Aliful yang membantu saya dalam mengerjakan peta untuk skripsi.
6. Termakasih buat kak Yuni yang bersedia membantu untuk mencetak laporan skripsi.
7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan PWK 16 B yang selalu memberi motivasi dan semangat yang penuh serta mengisi hari-hari dengan penuh candaan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmt dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul “ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram”.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, sehingga segala hambatan akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak di beri bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kemudahan dalam mengerjakan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan cepat.
2. Dr. H Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Fariz Primadi Hirsan, ST., MT, selaku ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Baiq Harly Widayanti, ST., MM, selaku dosen pembimbing I yang tiada henti membimbing, menyemangati dan mengarahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Serta ibu Sri Apriani Puji Lestari , ST.,MT, selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas segala masukan dan bimbingan yang telah di berikan kepada penulis.

6. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan PWK 16 yang selalu memberi motivasi dan semangat yang penuh serta mengisi hari-hari dengan penuh candaan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Mataram, 20 Agustus 2020

Penulis



ABSTRAK

Nama Penyusun : Hidayatusholiha

Nim : 416130070

Judul Skripsi : Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Di Kota Mataram

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram berfungsi sebagai fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN). Untuk menunjang Pelayanan Kegiatan Nasional perlu adanya sarana dan prasarana yang berstandar. Antara lain Bandara Udara Primer, Pelabuhan Laut (Utama), Terminal, Pasar Induk, Rumah Sakit tipe A, Perguruan Tinggi, Jalan Arteri Primer, dan jaringan transmisi tenaga listrik. Di bangunya Bandara Selaparang yang berlokasi di Kota Mataram bertempat di Kecamatan Selaparang sehingga pada saat itu Kota Mataram merupakan pintu gerbang masuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui udara pada tahun 1995. Dan juga adanya Pelabuhan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada tahun 1880 yang berfungsi sebagai jalur masuknya perdagangan nasional maupun internasional melalui laut, dan pada tahun 1973 Pelabuhan di pindahkan dari Kota Mataram ke Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2011 fungsi Bandara Udara dipindahkan dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Tengah. Dengan pindahnya fungsi beberapa kriteria fungsi PKN di Kota Mataram, maka perlu dilakukan evaluasi sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram. Variabel penelitian ini adalah seluruh dari standar sarana dan prasarana pelayanan kegiatan nasional. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Kota Mataram memiliki fungsi dengan skala nasional dan selain itu Kota Mataram memiliki potensi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pendidikan, pariwisata, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, dan simpul transportasi. Berdasarkan hasil evaluasi Kesesuaian Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram tidak sesuai kriteria fungsi PKN karena dari 4 fungsi yang harusnya ada di dalam kriteria fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram hanya memiliki 2 fungsi kriteria PKN. Sehingga fungsi pelayanan Kota Mataram tidak lagi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) tetapi berfungsi sebagai Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW)

Kata Kunci : Bandara, Kesesuaian, PKN, Prasarana, Sarana

ABSTRACT

Author's Name : Hidayatusholiha
Student's Number : 416130070
Thesis Title : **Evaluation of the Suitability of National Functions Activity Service in Mataram**

In the Local Regulation of the Province of West Nusa Tenggara (NTB) Number 3 of 2010 concerning the Spatial Plans for Mataram, it functions as a National Activity Service (PKN) function. In order to support the National Service Activities, it is necessary to have standardized facilities and infrastructures. Those are the Primary Airport, Seaports (main), Terminal, Main Market, Type A Hospital, Higher Education, Primary high way, and electric power transmission network. On the floor of the Selaparang Airport which was located at Selaparang, Mataram. At that time, Mataram was the gateway of the West Nusa Tenggara (NTB) through air in 1995. And in 1880, there was also a seaport in Ampenan which served as the entry point for national and international trade through sea. Then, in 1973 the port was moved from Mataram to Lembar Harbor in West Lombok. Furthermore, In 2011, the airport was also moved from Mataram to Central Lombok. By moving the function of some of the PKN from Mataram, it is necessary to conduct an evaluation. Therefore, the purpose of this study was to determine the suitability of the National Service Activities functions in Mataram. The variables of this research were all of the standardized facilities and infrastructures for the service of national activities. The analysis method used was descriptive qualitative. Based on the research results, it has found that Mataram has a function on a national scale. Besides, Mataram also has the potential for trade and service activities, educational activities, tourism, office activities, industrial activities, and transportation nodes. Moreover, the results of the evaluation showed that the suitability of the National Activity Service in Mataram did not match the criterias for the PKN function since of the 4 functions that should be fulfilled in the criteria for the National Activity Service function, Mataram had meet only 2 functions of the PKN criterias. So that the service function of Mataram is no longer as a National Activity Service (PKN) but it functions as a Regional (local) Activity Service (PKW).

Keywords: Airport, suitability, PKN, infrastructures, facilities



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan.....	iv
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	ix
Abstrak.....	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Manfaat	3
1.6 Ruang Lingkup.....	3
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.6.2 Ruang Lingkup Materi.....	3
1.7 Kerangka Berpikir	4
1.8 Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Terminologi Judul	6
2.2 Tinjuan Teori.....	6
2.2.1 Pengertian Evaluasi.....	6
2.2.2 Pusat Pelayanan	7
2.2.3 Stuktur Ruang Wilayah	16
2.3 Tinjuan Kebijakan.....	17

2.3.1 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.....	17
2.3.2 Permen dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota.....	20
2.3.3 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	21
2.3.4 Perda NTB No 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Sintesa Pustaka.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2 Pendekatan Penelitian	33
3.3 Jenis Penelitian.....	33
3.4 Variabel Penelitian	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisa Data.....	36
3.7 Desain Survey	37
BAB IV PEMBAHASAAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kota Mataram.....	39
4.1.1 Kondisi Fisik Dasar.....	39
4.1.2 Kondisi Fisik Binaan.....	42
4.2 Pembahasan Hasil.....	52
4.2.1 Evaluasi Stuktur Ruang	52
4.2.2 Evaluasi Kesesuaian Kota Mataram terhadap fungsi Kegiatan Pelayanan Nasional.....	61
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Pusat-pusat Pertumbuhan Berdasarkan Struktur Ruang.....	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.3 Sintesa Pustaka.....	31
Tabel 2.4 Variabel dan Sub Variabel	32
Tabel 3.1 Variabel dan Sub Variabel	34
Tabel 3.2 Desain Survey	37
Tabel 4.1 Luas Kota Mataram Dirinci Menurut Kecamatan.....	39
Tabel 4.2 Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut.....	41
Tabel 4.3 Banyak Hari Hujan Perbulan di Kota Mataram	42
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Mataram	43
Tabel 4.5 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Mataram.....	44
Tabel 4.6 Sarana Perkantoran Pemerintahan di Kota Mataram	44
Tabel 4.7 Perdagangan dan Jasa di Kota Mataram	45
Tabel 4.8 Jumlah Pelanggan Listrik PT PLN Menurut Jenis di Kota Mataram	48
Tabel 4.9 Jumlah Pelanggan Air Bersih.....	50
Tabel 4.10 Evaluasi Kesesuaian Kebijakan RTRW Provinsi NTB Terhadap Kriteria PKN Dalam PP. No 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional.....	56
Tabel 4.11 Evaluasi Kesesuaian Kebijakan RTRW Kota Mataram Terhadap Kriteria PKN Dalam PP No 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional	59
Tabel 4.12 Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kegiatan Nasional di Kota Mataram	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Admistrasi Kota Mataram	40
Gambar 4.2 Peta Jaringan Jalan Kota Mataram	47
Gambar 4.3 Peta Jaringan Listrik Kota Mataram.....	49
Gambar 4.4 Peta Jaringan Air Bersih Kota Mataram	51
Gambar 4.5 Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional.....	53
Gambar 4.6 Peta Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB.....	55
Gambar 4.7 Industri di Kota Mataram	63
Gambar 4.8 Peta Industri di Kota Mataram	64
Gambar 4.9 Sarana Perdagangan dan Jasa Kota Mataram.....	68
Gambar 4.10 Peta Sarana Perdagangan dan Jasa Kota Mataram.....	69
Gambar 4.11 Sarana Perkantoran dan Pelayanan Umum	71
Gambar 4.12 Peta Sarana Perkantoran dan Pelayanan Umum Kota Mataram	72
Gambar 4.13 SMA di Kota Mataram.....	73
Gambar 4.14 Perguruan Tinggi Kota Mataram.....	74
Gambar 4.15 Peta Sarana Pendidikan di Kota Mataram.....	75
Gambar 4.16 Sarana Pergudangan di Kota Mataram.....	77
Gambar 4.17 Peta Pergudangan di Kota Mataram.....	78
Gambar 4.18 Islamic Center	79
Gambar 4.19 Pantai Loaq Balok	80
Gambar 4.20 Peta Pariwisata Kota Mataram	83
Gambar 4.21 Terminal Mandalika	86
Gambar 4.22 Peta Terminal Mandalika	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Sebagai pendukung fungsi pelayanan kegiatan nasional tersebut harus adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut seperti, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perkantoran, sarana perdagangan dan jasa, prasarana jaringan jalan, prasarana transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, jaringan energi listrik, jaringan energi telekomunikasi, dan jaringan sumber air bersih.

Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 (tiga) Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2009-2029 Kota Mataram berfungsi sebagai Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) dan juga merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian. Memfungsikan Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) dibangun Bandara Selaparang yang berlokasi di Kota Mataram bertempat di Kecamatan Selaparang sehingga pada saat itu Kota Mataram merupakan pintu gerbang masuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui udara pada tahun 1995. Pelabuhan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada tahun 1880 yang berfungsi sebagai jalur masuknya perdagangan nasional maupun internasional melalui laut, dan pada tahun 1973 Pelabuhan di pindahkan dari Kota Mataram ke Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat (Kompas, 2012).

Adanya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan nasional di seluruh Provinsi NTB. Pada tahun 2011 fungsi Bandara yang berada di Kota Mataram di pindahkan ke Kabupaten Lombok Tengah dengan nama Bandara Lombok Internasional. Berdasarkan pernyataan PT. Angkasa Pura tidak dikembangkan

Bandara Selaparang bertaraf Internasional karena, secara teknik operasional tidak dapat mendukung penerbangan berbadan lebar (Maulana, 2012).

Pada Saat ini Bandara Selaparang di Kota Mataram di fungsikan sebagai tempat pelatihan Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan dan Pelabuhan yang ada di Kecamatan Ampenan Kota Mataram saat ini di fungsikan sebagai tempat wisata yang bernama Pantai Ampenan, yang memiliki fasilitas perdagangan, tempat duduk, tempat main anak, mushola, kamar mandi dan lahan parkir. Dan di sekitaran Pantai Ampenan masih terdapat bangunan peninggalan Belanda yang juga dijadikan sebagai objek wisata di Kota Mataram.

Dengan pindahnya bandara udara dan pelabuhan laut untuk memfungsikan Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram, maka penelitian ini perlu dilakukan melihat kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus kepada fasilitas sarana dan prasarana pendukung fungsi kegiatan nasional di Kota Mataram. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas struktur ruang Kota Mataram, kondisi fisik Kota Mataram, kegiatan non fisik di Kota Mataram dan kesesuaian Fungsi Pelayanan Nasional di Kota Mataram.

1.5 Manfaat

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat antara lain :

1. Dari hasil penelitian diharapkan memberikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai kebijakan kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.
2. Memberikan wawasan dalam bidang perencanaan wilayah kota, khususnya dalam kesesuaian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Mataram .

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Dalam penelitian ini adalah di Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok. Luas wilayah Kota Mataram 6.009,70 Hektar are (Ha), Kota Mataram memiliki 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 951,17 Ha dan yang wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 902,73 Ha. Secara geografis letak Kota Mataram yaitu antara 08°33' dan 08° 38' Lintang Selatan dan antara 116° 04'-116°10' Bujur Timur. Dan batas administrasi Kota Mataram yaitu :

Sebelah Timur :Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Selatan :Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Utara :Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Barat :Selat Lombok.

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan pembahasan penelitian dan memberikan batasan pengkajian permasalahan serta menghindari penelitian terlalu luas. Kajian materi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data atau sumber yang diperoleh dan literatur, serta referensi seperti dokumen-dokumen kebijakan terkait.

1.7 Alur Penelitian

Latar Belakang :

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional, Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- Kota Mataram adalah ibu Kota Provinsi NTB dala Perda Provinsi NTB No 3 Tahun 2010 tentang RTRWP NTB Tahun 2009-2029 Kota Mataram berfungsi sebagai Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN)
- Untuk mengfungsikan Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) di bangun Bandara Selaparang yang berlokasi di Kota Mataram di Kecamatan Selaparang sehingga saat itu Kota Mataram merupakan pintu gerbang masuk wilayah NTB melalui udara pada tahun 1995 dan dibangunnya Pelabuhan di Kecamatan Ampenan sebagai jalur perdagangan nasional hingga internasional pada tahun 1880. Dan pada tahun 2011 Bandara udara di pindahkan dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Tengah dan begitu juga dengan pelabuhan pada tahun 1973 di Kabupaten Lombok Barat.
- Bandara Udara Selaparang di Kota Mataram sekarang di fungsikan sebagai pelatihan Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan dan Pelabuhan di Kota Mataram saat ini di fungsikan sebagai objek wisata

Rumusan Masalah :

Bagaimana kesesuaian fungsi Pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.?

Tujuan :

Untuk mengetahui kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

Variabel penelitian:

- Struktur Ruang
- Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional

Metode/ Teknik Analisis :

Jenis Penelitian

- Kualitatif

Metode Pengumpulan Data

- Data Primer
- Data Primer

Teknik Analisis Deskripsi

- Evaluasi Struktur Ruang
- Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kota Mataram Terhadap Kriteria Fungsi Kegiatan Nasional.

Hasil dari penelitian evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram

Kesimpulan

1.8 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan teori, tinjauan kebijakan, dan adanya refrensi terkait dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa, dan desain survey.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta adanya saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Judul

Terminologi judul membahas akan makna dari sebuah judul penelitian agar dapat dipahami tujuan maupun sasaran dari penelitian yang diteliti. Adapun judul dari laporan tugas akhir ini yaitu “Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Di Kota Mataram” dari judul penelitian ini memiliki beberapa makna tersendiri yaitu :

1. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan menilai, menaksir dan mengkaji Echol dan Shadily dalam (Nugraha, 2012)

2. Kesesuaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2000) kesesuaian adalah keselarasan atau kecocokan.

3. Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pusat kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

Jadi judul penelitian tersebut adalah menilai kecocokan atau keselarasan pusat kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya yang diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi dan evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat atau mengkaji sebagaimana keberhasilan sebuah program tersebut (Nugraha, 2012).

Evaluasi adalah suatu tindakan yang digunakan atau yang dilakukan untuk menelaah atau memungkinkan hal yang sudah diputuskan untuk mengetahui kelemahan dan keputusan tersebut dan kelebihan keputusan untuk menentukan langkah-langkah alternatif perbaikan bagi kelemahan tersebut dan evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur, menilai, atau mengkaji sesuatu dengan cara aturan-aturan yang ada atau mencocokkan berdasarkan standar yang sudah ada (Muryadi, 2017).

Evaluasi adalah menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi evaluasi mampu membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan tetapi juga menyumbangkan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyusunan dan perumusan kembali masalah (Dunn, 2003).

2.2.2 Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan kota merupakan pusat dari segala kegiatan kota seperti, kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, teknologi dan pusat kota di tandai dengan adanya aktivitas campuran yang membentuk *Central Business District* (CBD) (Filipus, Tondobala, & Rengkung, 2019).

Menurut Bourne dalam (Prasetyo & Pigawati, 2013) pusat kota adalah permukiman yang kemudian berkembang menjadi pusat perkantoran, pusat komersil dan pusat komunikasi yang di sebut juga *Central Business District* (CBD) dan menurut Haris dan Ulman dalam (Prasetyo & Pigawati, 2013), pusat kota adalah suatu bagian kota dimana terdapat fungsi-fungsi utama kegiatan perkotaan yang mendominasi.

Sedangkan sub pusat pelayanan kota adalah suatu pusat yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas sebagian wilayah kota, dimana memiliki hirarki, fungsi, skala, serta wilayah pelayanan yang lebih rendah dari pusat kota, tetapi lebih tinggi dari pusat lingkungan (Lahagina, Poluan, & Mononimbar, 2015).

Pusat Pelayanan Kegiatan Kota atau Kabupaten yaitu sebagai simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi yang terdiri atas (Filipus, Tondobala, & Rengkung, 2019) :

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah Kota atau Kabupaten yang dimana memiliki standar sarana dan prasarana pendukung yaitu :

1. Bandara Udara Primer merupakan bandara udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandara udara yang melayani penumpang atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
2. Pelabuhan Laut Utama berfungsi untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antara provinsi.
3. Terminal Tipe A berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antara kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antara negara, angkutan antara kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota serta angkutan pedesaan.
4. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyaluran barang kebutuhan pasar lain.
5. Perguruan Tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal yang berupa, universitas, akademi, dan institut teknologi.

6. Rumah Sakit tipe A atau B. Rumah Sakit Tipe A merupakan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi atau pusat dan memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap atau memberi pelayanan yang lebih lengkap mulai umum, subspesialis hingga kedokteran spesialis oleh pihak pemerintah. Sedangkan Rumah Sakit tipe B adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota Provinsi yang menampung rujukan dari berbagai rumah sakit di Kabupaten.
 7. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 8. Jaringan Prasarana transmisi tenaga listrik yaitu untuk mendukung kawasan perkotaan yang berskala internasional, nasional, dan antar provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah Kota atau Kabupaten yang dimana , memiliki standar sarana dan prasarana pendukung yaitu :
1. Penyediaan rumah sakit tipe B
 2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional.
 3. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi;
 4. Penyediaan kawasan olahraga
 5. Penyediaan taman wilayah
 6. Jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana air bersih, jaringan transmisi yang berfungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala provinsi.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kota atau Kabupaten yang dimana, memiliki standar sarana dan prasarana pendukung yaitu :
1. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;

2. Pengembangan kantor-kantor skala kabupaten;
3. Peningkatan Rumah Sakit Tipe C menjadi B. Rumah sakit tipe C adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran terbatas, yaitu pelayanan dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kebidanan dan kandungan. Rumah Sakit Tipe C didirikan setiap kota atau kabupaten yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.
4. Pengembangan Masjid. Masjid adalah tempat kaum muslim beribadah.
5. Pengembangan sarana pendidikan skala kabupaten.
6. Pengembangan taman kabupaten dan pengembangan stadion olahraga.

2.2.2.1 Bandara Udara

Bandara Udara adalah tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muatan barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya, untuk melayani kepentingan umum (Suhardi, Roharjo, & Wirawati, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Nal Kbandaraan Nasional, bandara mempunyai hirarki terdiri atas :

1. Bandara Udara Pengumpul (Hub)

Bandara Udara Pengumpul adalah bandara udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandara udara yang melayani penumpang dan kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomu secara nasional atau berbagai provinsi. Macam-macam bandara pengumpul yaitu :

a. Bandara Udara Primer

Bandara udara primer adalah salah satu prasarana yang menunjang fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;

b. Bandara Udara Sekunder

Bandara udara sekunder adalah salah satu prasarana yang menunjang fungsi PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;

c. Bandara Udara Tersier

Bandara udara tersier adalah salah satu prasarana yang menunjang fungsi PKN dan fungsi Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih dari 1.000.000 (satu juta).

2. Bandara Udara Pengumpan (Spoke)

Bandara udara pengumpan adalah bandara udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan perkembangan ekonomi lokal dan salah satu prasarana penunjang fungsi Pelayanan Kegiatan Lokal (PKL).

2.2.2.2 Pelabuhan

Menurut Triatmojo dalam (Gultom, 2017) pelabuhan adalah suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuh maupun kendaraan air yang lainnya, yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, hewan, reprasi, pengisian bahan bakar, dan lain sebagainya. Dan juga di lengkapi dengan dermaga tempat membuat kapal, kran-kran untuk bongkar muatan, gudang, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lama.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan , pelabuhan memiliki fungsi kegiatan pemerintahan dan

pengusahaan. Pelabuhan terdiri dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau. Pelabuhan laut terdiri dari :

1. Pelabuhan Utama

Pelabuhan utama adalah yang berfungsi untuk melayani angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, serta sebagai tempat penumpang atau barang penyerbangan dengan jangkauan antar provinsi.

2. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpul berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang, barang, serta angkutan penyerbangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

3. Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan pengumpan berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, sebagai tempat asal tujuan penumpang barang, serta angkutan penyerbang dengan jangkauan pelayanan provinsi.

2.2.2.3 Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaik dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Setiawan, 2018).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tipe terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanan dibagi menjadi :

1. Terminal Penumpang Tipe A

Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

2. Terminal Penumpang Tipe B

Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

3. Terminal Penumpang tipe C

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.

2.2.2.4 Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan pasar terdiri dari kios-kios, atau gerai, los, dan dasarnya terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar (Wicaksono & Harsasto, 2012).

Jenis pasar tradisional menurut jenis dan kegiatannya yaitu (Aliyah, 2017) :

1. Pasar eceran yaitu, pasar yang permintaan dan penawaran secara eceran.
2. Pasar grosir yaitu, pasar yang permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
3. Pasar induk yaitu, pusat pengumpul dan penyimpan bahan pangan yang akan disalurkan ke pasar grosir dan pusat pembelian.

2.2.2.5 Rumah Sakit Umum

Rumah sakit umum adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit umum pemerintah diklasifikasikan dalam beberapa jenis yaitu (Fitriana, 2012) :

1. Rumah Sakit Tipe A

Rumah sakit tipe A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis secara luas. Rumah sakit tipe A ditetapkan sebagai fungsi pelayanan rumah sakit rujukan tertinggi atau rumah sakit pusat

2. Rumah Sakit tipe B

Rumah sakit tipe B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibu kota dan provinsi yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten.

3. Rumah Sakit Tipe C

Rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas, yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kebidanan dan kandungan. Rumah sakit kelas C didirikan di setiap ibukota kabupaten yang menampung rujukan dari puskesmas.

4. Rumah Sakit Tipe D

Rumah sakit tipe D adalah rumah sakit yang bersifat transisi karena pada satu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Kemampuan rumah sakit kelas D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah tipe D juga menampung rujukan yang berasal dari puskesmas.

5. Rumah Sakit Tipe E

Rumah sakit tipe E adalah rumah sakit khusus yang menyelenggarakan satu macam pelayanan kedokteran saja,

misalnya rumah sakit kusta, rumah sakit paru, rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit gigi dan mulut, dan lain sebagainya.

2.2.2.6 Jaringan Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termaksud bangunan pelengkap dan perlengkapan yang digunakan sebagai pergerakan lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hierarki yaitu :

1. Jaringan Jalan Arteri Primer

Jaringan jalan arteri primer berfungsi menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

2. Jalan Kolektor Primer

Jaringan jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan melayani dan menghubungkan kota-kota antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal atau kawasan berskala kecil.

2.2.2.7 Jaringan Listrik Transmisi

Jaringan listrik transmisi adalah tenaga listrik dari pembangkitan listrik yang didistribusikan hingga sampai pada konsumen penggunaan jaringan listrik. Saluran transmisi dapat dilihat dari jarak atau panjang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (Sujatmiko, 2009) :

1. Saluran transmisi jarak pendek adalah saluran yang panjangnya kurang 80 km.
2. Saluran transmisi jarak menengah adalah saluran panjangnya antara 80-240 km.
3. Saluran transmisi jarak jauh adalah saluran yang panjangnya lebih 240 km.

2.2.3 Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan Kabupaten/Kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten/Kota. Adapun rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah Kabupaten/Kota yang memberikan layanan bagi wilayah Kabupaten/Kota
- b. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi jaringan yang menunjang keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan Kabupaten/Kota;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahun untuk 20 (dua puluh) tahun.

Struktur ruang terutama terbentuk karena adanya jaringan prasarana transportasi dan pusat pertumbuhan. Pelayanan transportasi bagi aktivitas ekonomi yang berskala besar tetap di pertahankan dengan memelihara fungsi sarana penting yang ada. Dengan demikian, struktur wilayah akan dibentuk melalui (Mahi, 2016) :

1. Optimalisasi pelayanan prasarana transportasi arteri yang ada, sehingga distribusi aksesibilitas dapat dilakukan secara terpadu dengan memafatkan prasarana arteri yang ada.
2. Mendorong pembangunan *feer-road* yang berfungsi sebagai kolektor untuk melayani pusat-pusat produksi komoditas primer dengan pusat produksi lokal atau agropolitan di seluruh bagian wilayah.
3. Bersamaan dengan pembangunan *feer-road*, pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan kecil juga didorong untuk melayani perdagangan antar bagian wilayah.

4. Meningkatkan pelayanan prasarana perkotaan untuk pusat-pusat lokal atau agropolitan sehingga mampu berfungsi sebagai pusat agro-industri dan agrobisnis.
5. Mendorong pemanfaatan jalur kereta api untuk melayani pergerakan jarak sedang antar bagian wilayah dengan bagian wilayah lainnya.

Wawasan sistem tata ruang menekan pada keterkaitan antara tiga proses yang saling bergantung, yaitu :

1. Proses pengalokasian aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu.
2. Proses pengadaan atau ketersediaan sarana fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti tempat pekerja, tempat tinggal, transportasi, dan komunikasi. Proses ini misalnya pengadaan bangunan jalan, utilitas umum, dan sebagainya. Dalam proses pengalokasian aktivitas akan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan buatan, serta kondisi fisik di wilayah tersebut.

2.3 Tinjauan Kebijakan

2.3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional meliputi :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Nasional adalah, rencana ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang Kabupaten atau kota mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalam bumi. Muatan rencana

tata ruang mencakup struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang yaitu, rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang yaitu penentuan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan yaitu :

- a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
 - b. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi ruang nasional;
 - c. Upaya pemetaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - g. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
1. Rencana Tata Ruang Nasional memuat :
 - a. Tujuan, kebijakan strategis penataan rencana wilayah nasional
 - b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. Penetapan kawasan strategis nasional
 - d. Arah pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - e. Arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus mengacu pada yaitu :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Pedoman bidang penataan ruang;

- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus memperhatikan :
 - a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan;
 - g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memuat pada yaitu :
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dan wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi
 - d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

2.3.2 Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

Peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah darat, laut, udara dan dalam bumi dalam satu kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kota atau Kabupaten, pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas terintegritas dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten atau Kota.

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, yang dikembangkan untuk melayani skala provinsi. Rencana stuktur ruang wilayah provinsi, terdiri dari :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi, PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi, PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten atau kota.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah di daerah provinsi berfungsi sebagai kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

2.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. RTRWN bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang pengendalian ruang di wilayah nasional, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah provinsi, serta keserasian antara sektor, penetapan lokasi dan fungsi untuk inventasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi, sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan jaringan sumber daya air. Sistem perkotaan nasional terdiri sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Tabel 2.1

Kriteria pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ruang

No	Pusat Kegiatan	Kriteria	Sarana Minimal
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhanhubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhubungan : Bandara udara (Primer) dan atau Pelabuhan laut (utama) dan atau terminal tipe A. b. Ekonomi : Pasar induk antar wilayah. c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B. d. Pendidikan : Perguruan tinggi e. Jalan arteri primer. f. Jaringan Prasarana : jaringan jaringan transmisi tenaga listrik untuk mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala internasional, nasional, dan antar provinsi.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN. c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa Kabupaten. d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan rumah sakit tipe B; b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional; c. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; d. Penyediaan kawasan olahraga; e. Penyedia masjid wilayah; f. Penyediaan taman wilayah. g. Jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang

			berskala provinsi
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa Kecamatan; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi melayani skala kabupaten atau beberapa Kecamatan. c. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.	a. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa; b. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten; c. Peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B; d. Penyediaan rumah sakit tipe C; e. Pengembangan masjid kabupaten; f. Pengembangan pendidikan skala kabupaten; g. Pengembangan taman kabupaten; Pengembangan stadion olahraga kabupaten.

Sumber :Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2.3.4Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2009-2029

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTB adalah mewujudkan ruang wilayah yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam.

Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pusat Pemerintahan;
2. Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan jasa;
3. Pusat Pengolahan hasil pertanian dan hasil laut;
4. Pusat Pelayanan umum, pariwisata dan transportasi;

Dalam rencana sistem jaringan di Kota Mataram meliputi :

1. Sistem jaringan transportasi nasional yaitu terdiri dari sistem transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi :
 - a. Sistem Sistem transportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas angkutann jalan dan jaringan angkutan sungai, danau, penyebrangan.
 - b. Jaringan lalu lintas angkutan terdiri dari jaringan jalan dan jaringan lalu lintas angkutan jalan;
 - c. Jaringan jalan nasional terdiri arteri primer dan jalan kolektor primer;
 - d. Jaringan Prasarana terdiri terminal penumpang Kelas A berada di Mataram, Gerung, Sumbawa Besar, dan Raba.
2. Jaringan Telekomunikasi yaitu meliputi :
 - a. Dalam sistem jaringan mikro Kota Mataram termasuk dalam digital perkotaan wilayah Kota Mataram;
 - b. Jaringan serat optik dalam provinsi terapkan dalam bentuk situs internet untuk kota dalam wilayah masing-masing Kota Mataram;
 - c. Jaringan terestrial dalam provinsi terapkan dalam bentuk jaringan teknologi seluler, di masing-masing lokasi wilayah Kabupaten/Kota Mataram;
 - d. Pengembangan stasiun telepon otomatis di Kota Mataram;
 - e. Pengembangan jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram.
3. Sistem jaringan prasarana persampahan yaitu tempat pembuangan akhir di Kabupaten Lombok Barat dengan sistem *sanitary landfill*.
4. Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah provinsi yaitu :
 - a. Sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat);
 - b. Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram dan sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis/ Tahun	Tujuan	Variabel	Metode Analisa	Hasil Penelitian
1	Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kota Wonosobo Sebagai Pusat Pelayanan	Ndaru Preseryo dan Bitta Pigawati (2013)	Untuk mengetahui kesesuaian fungsi pusat Kota Wonosobo sebagai Pusat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Ruang • Fungsi Pusat Kota 	<p>Metode analisis yang di gunakan dilakukan dengan menggunakan teori dengan alur deduktif dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk di uji sesuai dengan kondisi fonemena yang ada di lapangan, maka metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Analisis yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Zonasi Pusat Kota Wonosobo • Analisis Kondisi Fisik Pusat Kota Wonosobo • Analisis Kesesuaian Terhadap Fungsi Pusat Kota Sebagai Pusat Pelayanan. 	<p>Hasil dari penelitian adalah Kota Wonosobo mempunyai struktur ruang model poros karena dalam perembangan di pengaruhi oleh jaringan jalan. Kondisi penggunaan lahan pusat perkotaan wonosobo didominasi oleh lahan terbangun yang sehingga menunjukkan sifat perkotaan yang jelas. Fungsi yang dimiliki oleh pusat kota Wonosobo belum sesuai dengan fungsi seharusnya dimiliki oleh suatu pusat karena hanya memiliki 8</p>

					<ul style="list-style-type: none"> Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Induk (RIK) Wonosobo. 	dari 9 fungsi Kota sebagai fungsi pelayanan.
2	Analisa Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanan Di Kabupaten Minahasa Utara	Theodorus Filipius, Linda Tandobala, dan Michael M. Rengkang (2019).	Untuk menganalisis kondisi struktur ruang Kabupaten Minahasa Utara dan mengetahui permasalahan yang terjadi pada pusat-pusat pelayanan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Stuktur Ruang Demografi Sosial Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Skalogram Analisa Pusat Pelayanan 	minahasa utara sudah memiliki kualitas baik dan fasilitas umum sosial di Minahasa Utara sudah cukup baik. Dan adanya ketidak sesuaian yang terjadi antara hirarki struktur ruang RTRW 2013-2033 dankondisi eksisting yang ada, sehingga perlu penambahan fasilitas yang masih kurang pada setiap daerah serta pelayanan agar sesuai dengan arahan sebagai PKN, PKWp, PPK, dan PKL
3	Kajian Struktur Ruang Kota Temohon	Jason J. Geovani P. Lahafina dkk (2015)	Mengkaji struktur ruang Kota Temohon	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pendidikan Fasilitas peribadatan 	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian penulis	Struktur pelayanan kegiatan di Kota Temohon terdapat struktur pusat

				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kesehatan • Fasilitas Perdagangan • Fasilitas Perkantoran • Jaringan jalan • Terminal 	merankum dari beberapa teori maupun kebijakan terkait dengan struktur ruang.	pelayanan primer di Kota Temohon dan bentuk struktur kota, Kota Temohon mendekati konsep konsentris, pola perkembangan kotanya berada di tengah-tengah Kota Temohon sebagai daerah pusat kota.
4	Pengaruh Pemindahan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Boyolali Terhadap Perkembangan Perkotaan Boyolali	Fitria Nur Rohman dan Bakti Setiawan (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Perkembangan Perkotaan • Identifikasi kesesuaian perkembangan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan fisik perkotaan • Sarana dan Prasarana • Kesesuaian Penggunaan lahan RDTR 	Metode analisis yang di gunakan adalah deskriptif komprasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemindahan lokasi pemerintahan 2007-2012 dan tahun 2012 dan penelitian menggunakan data primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan ruang akibat relokasi.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemindahan kawasan perkantoran memicu perkembangan perkantoran di tandai dengan perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa, dan daerah industri. Hasil analisis penggunaan lahan

						eksisting tahun 2018 dengan zonas peruntukan lahan berdasarkan RDTR Kawasan Perkotaan Boyolali 2012-2013 menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan penggunaan lahan Ruang terbuka Hijau dan industri
5	Indentifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukung Dalam Pengembangan Wilayah	Yarman Gulo (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpeluang atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias. • Menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (<i>growth center</i>) dan daerah sekitarnya (<i>Hinterland</i>) kecamatan pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Ekonomi • Fasilitas Sosial • Fasilitas Pemerintahan 	Metode analisis yang digunakan : <ul style="list-style-type: none"> • Analisis skalogram • Analisis Gravitasi 	Hasil penelitiannya adalah dari analisis skalogram dan analisis gravitasi maupun kebijakan RTRW Kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan utama di Kabupaten Nias adalah Kecamatan Gido, Pusat pertumbuhan kedua, yaitu Kecamatan Idanogawo, dan pusat pertumbuhan ketiga Kecamatan Botomuzoi.

2.5 Sintesa Pustaka

Sintesa pustaka merupakan perumusan variabel yang digunakan dalam penelitian evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram. Variabel dalam penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan metode penelitian. Berikut ini adalah tabel sintesis teori berdasarkan kajian pustaka:

Tabel 2.3
Sintesa Pustaka

No	Uraian	Sumber/ Tahun	Variabel	Sub Variabel
1	Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan Kabupaten/Kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten/Kota	Mahi (2016)	Struktur Ruang	-
2	Standar Kriteria Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Kriteria Fungsi Pelayanan	1. Kawasan perkotaan yang berfungsi ataupun berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional melayani beberapa provinsi

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; 4. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan laut.
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa pustaka pada tabel 2.3 yaitu berupa variabel-variabel yang akan di rumuskan atau menjadi *input* dalam melakukan penelitian. Tujuan darirumusan untuk mengetahui variabel-variabel yang akan menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian. Berikut ini variabel-variabel yang terpilih dalam penelitian evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram berdasarkan struktur ruang dan kriteria fungsi kegiatan nasional pada tabel 2.4:

Tabel 2.4
Variabel Penelitian

Tujuan	Variabel	Sub Variabel
Untuk mengetahui kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram	Struktur Ruang	-
	Kriteria Fungsi Pelayanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi ataupun berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional melayani beberapa provinsi 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; 4. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan laut.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok. Luas wilayah Kota Mataram 6.009,70 Ha, Kota Mataram memiliki 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 951,17 Ha dan yang wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 902,73 Ha. Secara Geografis letak Kota Mataram yaitu antara 08°33' dan 08° 38' Lintang Selatan dan antara 116° 04'-116°10' Bujur Timur. Batas administrasi Kota Mataram yaitu :

Sebelah Timur	: Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Selatan	: Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Utara	: Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Barat	: Selat Lombok.

Adapun waktu penelitian dilakukan sekitar 4 bulan yaitu di mulai dari bulan Maret-Juni 2020.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatan kualitatif ini menjelaskan dan menceritakan struktur ruang dan kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram. Pendekatan kualitatif ini berguna menjelaskan data-data yang didapatkan, dalam wawancara, pengamatan langsung, literatur, kebijakan, jurnal, dan di instansi dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis evaluatif. Jenis penelitian evaluatif adalah penelitian yang bersifat mengevaluasi suatu kegiatan atau program dalam menentukan keberhasilan suatu program apakah sesuai atau

tidak, dan penelitian evaluatif merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program (Katun, 2017). Penelitian evaluatif ini untuk mengembangkan teori berkaitan dengan pelayanan kegiatan nasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dan sub variabel penelitian ini berkaitan dengan struktur ruang dan kriteria fungsi pelayanan kegiatan nasional. Berikut ini adalah variabel dan sub variabel :

Tabel 3.1
Variabel dan Sub Variabel

Variabel	Sub Variabel
Struktur Ruang	-
Kriteria Fungsi Pelayanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi ataupun berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional melayani beberapa provinsi 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; 4. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan laut.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari pengumpulan data secara langsung (survey primer) dan pengumpulan data tidak langsung (survey sekunder).

1. Pengumpulan Data Primer

Data yang di peroleh dari survey di lapangan, mengamati objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun survey primer yaitu :

a. Observasi

Observasi lapangan adalah suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung di lapangan untuk melihat fasilitas pendukung sarana dan prasarana fungsi PKN di Kota Mataram.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan di lakukan kepada pelaku industri dan staff gudang di Kota Mataram.

c. Dukumentasi

Untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari data dokumentasi yang berupa foto fasilitas sarana dan prasarana di Kota Mataram.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian studi kepustakaan berupa buku ,jurnal, dan literatur yang akurat dan relavan dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder ini terkait kesesuain fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Kota Mataram:

a. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Mataram

- Kota Mataram dalam Angka 2020

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram

- RTRW Provinsi NTB
- RTRW Kota Mataram
- RTRW Nasional

c. Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) yaitu jenis data listrik yang terpasang di Kota Mataram.

d. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu peta sebaran jaringan jalan Kota Mataram.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan deskripsi berikut ini evaluasi yang dilakukan adalah :

1. Evaluasi Stuktur Ruang yaitu :
 - a. Evaluasi fungsi pelayanan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
 - b. Evaluasi fungsi pelayanan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2009-2029.
 - c. Evaluasi kesesuaian RTRW Provinsi NTB terhadap kriteria fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional.
 - d. Evaluasi fungsi pelayanan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Mataram Tahun 2011-2031.
 - e. Evaluasi kesesuaian RTRW Kota Mataram terhadap kriteria fungsi PKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional.
2. Evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

3.7 Desain Survey

Tabel 3.2 Desain Survey

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang diperlukan	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Analisis Yang digunakan	Output
1	Untuk mengetahui kesesuaian fungsi kegiatan nasional di Kota Mataram	Stuktur Ruang	-	Dokumen kebijakan yaitu : a. RTRW Nasional b. RTRW Provinsi NTB c. RTRW Kota Mataram	BAPPEDA	Sekunder	Evaluasi Struktur ruang	Hasil evaluasi kesesuaian fungsi kegiatan nasional di Kota Mataram.
		Kriteria Fungsi Pelayanan Nasional	1.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau gerbang menuju kawasan internasional	a. Bandara Udara (Primer) b. Pelabuhan Laut (Utama)	Data sekunder yang di validasi oleh survey primer	Sekunder dan observasi	Evaluasi Kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram	
			2.Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi	a. Pasar Induk b. Perguruan Tinggi c. Jaringan Listrik transmisi d. Rumah Sakit tipe A atau B				

			3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terminal Tipe A b. Jaringan Jalan Arteri primer 				
			4. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan	Pelabuhan Laut Utama				